

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



Pemerintah Kabupaten Tapin

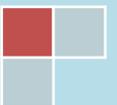
Dinas Perikanan

Jl. Jendral Sudirman Km. 2,5 Rantau 71111

Telp / Fax : (0517)31491

Email : diskan_tapin@yahoo.com

diskan.tapin@gmail.com





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kegiatan, penetapan indikator kinerja, pengukuran, analisa pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja selama Tahun 2020. Laporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin selama Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Rantau, 2023
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tapin

H. PARIANATA, S.AP, MM
NIP. 19660512 198602 1 006



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pencapaian Indikator Kinerja Utama	20
B. Realisasi Pencapaian Anggaran.....	25
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
BAB IV PENUTUP.....	30



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang bisa dan telah dicapai oleh instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Tapin sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan landasan bagi melaksanakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat termasuk pembangunan perikanan.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”, setelah terbitnya Perda No.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 03 Oktober 2016 bahwa untuk Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh SOPD Dinas Perikanan Kabupaten Tapin.

Pembangunan perikanan dilaksanakan dengan orientasi pendekatan agribisnis memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal, peningkatan aktivitas ekonomi perdesaan dan terciptanya kondisi yang menjamin pembangunan. Agar pembangunan perikanan dapat dilaksanakan secara optimal diperlukan upaya agar sumber daya manusia menjadi profesional dalam menangani/mengelola perikanan untuk menghasilkan berbagai produk unggulan yang mampu bersaing di pasar domestik dan internasional sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya maupun nelayan tangkap, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat.

Pembangunan Perikanan pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di wilayah kabupaten Tapin baik sumber daya alam maupun SDM yang bertujuan untuk meningkatkan

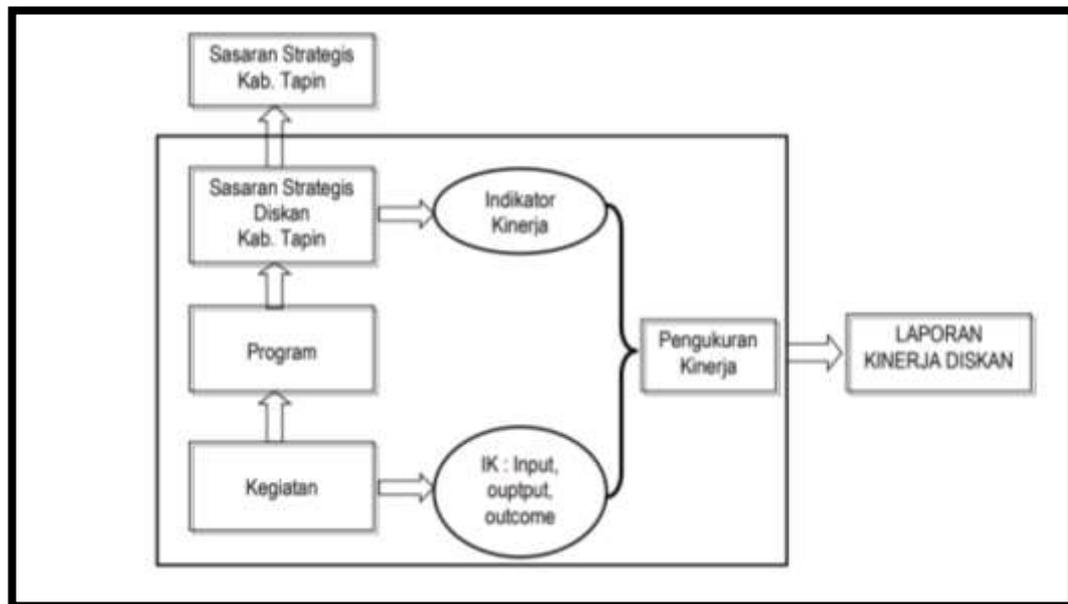


pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif serta dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi masyarakat akan protein asal ikan agar tidak terjadi “*Lost Generation*” .

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin.

Indikator Kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Tapin, Indikator keluaran (output) indicator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin. Gambaran Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun, disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja





Metode penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tapin telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor : 05 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Daerah Kabupaten Tapin. Struktur organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Tapin, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perikanan Budidaya
- d. Bidang Perikanan Tangkap
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis ; UPT BBI LOKAL LINUH
 - Kepala UPT BBI Lokal Linuh
 - Kepala Tata Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, disebutkan bahwa Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapin dibidang perikanan yaitu mempunyai tugas melaksanakan urusan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Perikanan Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut :



1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
5. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dari Dinas Perikanan Kabupaten Tapin di atas dipilah-pilah menjadi 5 (lima) kelompok kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bagian Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan program dan rencana kegiatan dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan, serta penyusunan laporan.
- b. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan, perikanan budidaya.
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan kecil dan Usaha Perikanan pembudidaya ikan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan mengkoordinasikan usaha tani dan sumber daya, pengolahan dan mutu hasil serta promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan kelompok.

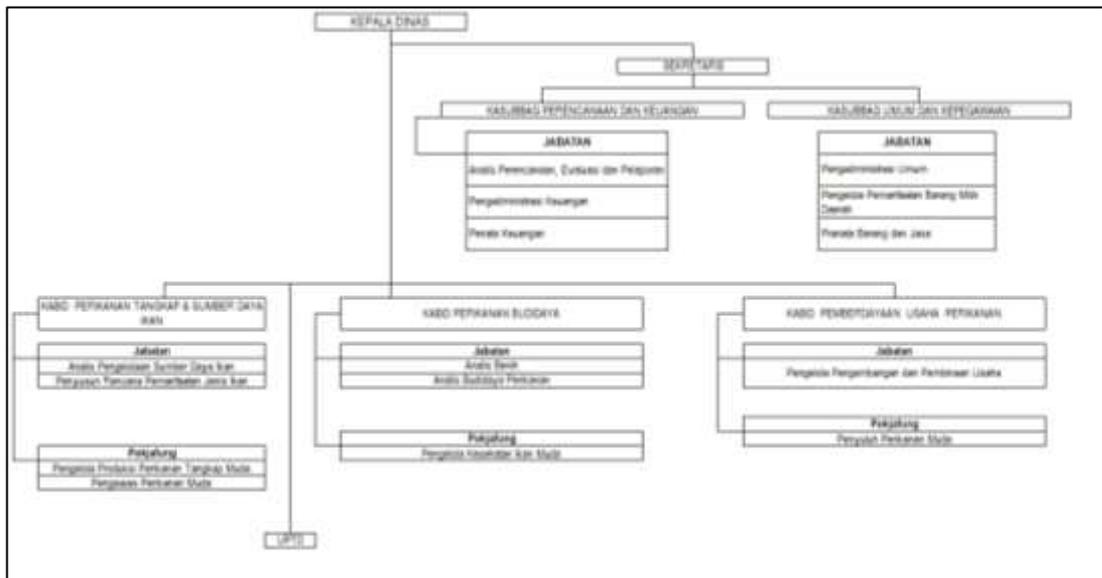


- d. Bidang Perikanan tangkap dan sumber daya ikan menyelenggarakan pembinaan perikanan tangkap, pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan serta penyebaran informasi.
- e. UPTD BBI Lokal Linuh mempunyai tugas melaksanakan pembenihan, menyediakan benih, menyediakan tempat jual beli benih ikan air tawar, meningkatkan produksi benih / induk ikan air tawar, melaksanakan percontohan pembenihan, melaksanakan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar, dan melaksanakan urusan tata usaha

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja di bidang pembangunan perikanan melalui peningkatan kompetensi aparat sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional, berhasil guna dan berdaya guna untuk melaksanakan otonomi daerah dan mewujudkan Good Governance.

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin digambarkan dalam Diagram 1.2.

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin



Permasalahan utama yang perlu direspon berkaitan dengan peran dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun yaitu :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana produksi kelompok pembudidaya ikan;



- 2) Rendahnya tingkat penggunaan induk/benih ikan yang unggul oleh masyarakat;
- 3) Kurangnya pembenihan ikan lokal;
- 4) Adanya hama penyakit ikan pada usaha perikanan budidaya;
- 5) Kurangnya kesehatan lingkungan kawasan perikanan budidaya;
- 6) Belum optimalnya pembudidaya ikan terhadap akses pasar, teknologi dan sumber permodalan;
- 7) Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk usaha perikanan budidaya;
- 8) Masih kurangnya minat masyarakat terhadap budidaya ikan karena anggapan usaha budidaya ikan masih *high risk* (risiko tinggi);
- 9) Belum adanya revitalisasi terhadap kolam marginal , keramba dan jaring apung (KJA);
- 10) Kurangnya permodalan bagi kelompok pembudidaya ikan
- 11) Penurunan populasi ikan lokal di habitat alami
- 12) Kurangnya pemahaman nelayan tentang pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI);
- 13) Terbatasnya sarana dan prasarana serta personil dalam pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum;
- 14) Masih adanya jual beli anak ikan dan penangkapan ikan secara ilegal di perairan umum;
- 15) Terbatasnya kemampuan para pelaku usaha pengolahan ikan dalam diversifikasi hasil olahan produk perikanan;
- 16) Kurangnya sarana pengolahan hasil perikanan;
- 17) Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang kreasi menu pangan lokal;
- 18) Masih rendahnya tingkat SDM pelaku usaha Perikanan.

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Perikanan tahun 2020-2021 sebagai berikut :



Tabel 1.1 Rincian penilaian Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan Tahun 2020

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	28,33
b.	Pengukuran Kinerja	25	19,06
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,04
d.	Evaluasi Internal	10	6,92
e.	Capaian Kinerja	20	15,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Tabel 1.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan Tahun 2020

No	Hasil Evaluasi	Saran Tindak Lanjut
1	Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi	Agar mengembangkan dan menggunakan teknologi informasi untuk mengukur kinerja
2	Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilaksanakan secara terjadwal	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan secara bulanan
3	Pemantauan Rencana Aksi belum semua memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Agar Rencana Aksi diberikan penilaian dan alternatif atas seluruh aksi yang dilaksanakan
4	Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

1. Visi dan Misi Kabupaten Tapin

Untuk melaksanakan peran strategisnya Dinas Perikanan berupaya terus memperbaiki kerjanya. Pembangunan Perikanan merupakan rangkaian berbagai upaya mengembangkan kapasitas masyarakat perikanan agar mampu melaksanakan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri dan selanjutnya mampu memperbaiki kehidupannya sendiri. Dalam hal ini pihak aparat berperan sebagai simulator, motivator dan fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para pelaku usaha Perikanan, agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.

Demi mendukung visi yang telah di rumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tapin Periode 2018 – 2023 yaitu Pemerintah Kabupaten Tapin ingin mewujudkan “ BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS ” dan misi “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa “ Dinas Perikanan melakukan hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembangunan Perikanan adalah suatu proses perubahan untuk menuju kehidupan yang lebih baik melalui pengelolaan sumber daya perikanan di kabupaten Tapin;
2. Berdaya saing ditandai dengan pemberdayaan masyarakat dan berkembangnya ekonomi rakyat sebagai pelaku agribisnis, terciptanya peluang pasar, menguatnya kelembagaan usaha tani, diterapkan IPTEK dan manajemen ekonomi modern dalam kegiatan agribisnis;
3. Berkelanjutan ditandai dengan oleh kemampuan mengembangkan usaha dan memenuhi permintaan pasar secara berkesinambungan dengan tetap



memperhatikan kemampuan dan kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup;

4. Berkeadilan ditandai dengan adanya kesempatan berusaha yang seluasnya – luasnya dan keseimbangan antara kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang terhadap usaha kecil dan menengah untuk berusaha;
5. Untuk kesejahteraan masyarakat mengandung pengertian bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan sepenuhnya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat perikanan, terutama pembudidaya, nelayan, pedagang ikan, pengolah skala kecil dan menengah dan sektor perikanan merupakan sumber kehidupan dan penghidupan yang layak dan prospektif sebagai usaha dalam skala bisnis.

Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tapin Dinas Perikanan melakukan upaya agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
- 2) Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan tata laksana kerja
- 3) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perikanan
- 4) Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Perikanan

2. Tujuan, Sasaran , Indikator Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Dinas Perikanan demi mendukung visi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tapin pada kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan (2018-2023), yaitu “Berkembangnya agrobisnis dan pariwisata”.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Tapin yaitu “ Meningkatkan Produksi Perikanan”



c. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran hasil yang akan dicapai Dinas Perikanan adalah “Persentase Peningkatan Produksi Perikanan” baik Perikanan Budidaya maupun Perikanan Tangkap.



Tabel 2.1. Indikator Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2018 – 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target	Target Capaian Tahun										Kondisi Akhir		
			2018		Selama	2019		2020		2021		2022		2023		Ton	%	
			Ton	%	5 tahun	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan																	
	1 Produksi perikanan budidaya	Ton	300	100	1.901	324	349,92	100	377,91	100	408,15	100	440,8	100	1.901	100		
	2 Produksi perikanan tangkap	Ton	3950	100	20.229,08	3.981,60	4.013,45	100	4.045,56	100	4.077,92	100	4.110,55	100	20.229,08	100		
	3 kelompok yang naik kelas	kel	13	100	39	8	7	100	8	100	8	100	8	100	39	100		



d. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian sasaran strategis adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023. Kebijakan pembangunan perikanan diarahkan untuk Meningkatkan Produktivitas, efisiensi, nilai tambah produk dan kelembagaan kelompok usaha perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, nelayan penangkap ikan dan pengolah hasil produk perikanan pada tingkat yang memadai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Tapin menempuh beberapa kebijakan pembangunan perikanan, antara lain adalah :

i. Kebijakan Publik

Mendorong semua aparat perikanan agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya pembudidaya ikan agar mereka dapat berusaha perikanan secara agribisnis, mendapatkan modal secara mudah dan murah, menerapkan teknologi tepat guna spesifikasi lokasi, meningkatkan produktivitas perikanan guna memanfaatkan peluang pasar yang masih terbuka luas.

ii. Kebijakan Teknis

- a) Peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk;
- b) Pengembangan dan Pengawasan sistem jaminan mutu dan penelusuran produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri;
- c) Konservasi dan rehabilitasi sumber daya perikanan dan upaya adaptasi bencana dan perubahan iklim;
- d) Pengawasan Pemanfaatan sumber daya perikanan;
- e) Pengembangan sumber daya manusia iptek perikanan;
- f) Peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan, nelayan penangkap ikan dan pengolah hasil perikanan;
- g) Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi perikanan

Penetapan kebijakan dan program, serta pemilihan kegiatan merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan untuk mengisi / memanfaatkan semua peluang



dalam upaya mencapai sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2022.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2. Rencana Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Ketersediaan pangan asal ikan	Jumlah pangan asal ikan	8.312,40
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan	4.064,68

Setiap awal tahun berjalan Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun penetapan kinerja yang selanjutnya di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Bupati Tapin dan Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kecamatan. Demikian pula halnya dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin juga menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang ditandatangani Kepala Dinas Perikanan dan Bupati Tapin dan di tindak lanjuti dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Pejabat Eselon III (tiga) di bawahnya , dan selanjutnya antara pejabat eselon tiga (tiga) dengan Pejabat eselon IV (empat) di bawahnya Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan untuk mencapai sasaran strategis yang di tetapkan. Penetapan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel. 2.3. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN
3.01 . 3.01.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197.600.000
3.01 . 3.01.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	197.600.000
3.01 . 3.01.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.060.427.891
3.01 . 3.01.01.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.000.858.291
3.01 . 3.01.01.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.600.000
3.01 . 3.01.01.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.969.600
3.01 . 3.01.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	943.749.600
3.01 . 3.01.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.889.000
3.01 . 3.01.01.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.275.000
3.01 . 3.01.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.354.600
3.01 . 3.01.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.300.000
3.01 . 3.01.01.01 . 06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.387.000
3.01 . 3.01.01.01 . 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000
3.01 . 3.01.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	684.144.000
3.01 . 3.01.01.01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	318.086.700
3.01 . 3.01.01.01 . 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.086.700
3.01 . 3.01.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.528.400
3.01 . 3.01.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.188.400
3.01 . 3.01.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.430.000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

3.01 . 3.01.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.355.800
3.01 . 3.01.01.01 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.500.400
3.01 . 3.01.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.775.400
3.01 . 3.01.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	223.080.000
3.01 . 3.01.01.01 . 15	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	96.810.700
3.01 . 3.01.01.01 . 15.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	35.050.700
3.01 . 3.01.01.01 . 15.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	61.760.000
3.01 . 3.01.01.01 . 16	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.580.000
3.01 . 3.01.01.01 . 16.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	53.580.000
3.01 . 3.01.01.01 . 22	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.500.000
3.01 . 3.01.01.01 . 22.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.500.000
3.01 . 3.01.01.01 . 24	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.447.600.302
3.01 . 3.01.01.01 . 24.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.087.806.952
3.01 . 3.01.01.01 . 24.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	327.593.350
3.01 . 3.01.01.01 . 24.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.700.000



3.01 . 3.01.01.01 . 25	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	195.967.800
3.01 . 3.01.01.01 . 25.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	195.967.800
3.01 . 3.01.01.01 . 26	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	36.400.000
3.01 . 3.01.01.01 . 26.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.400.000
3.01 . 3.01.01.01 . 27	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	4.760.000
3.01 . 3.01.01.01 . 27.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	4.760.000
3.01 . 3.01.01.01 . 28	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	153.501.300
3.01 . 3.01.01.01 . 28.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	132.253.500
3.01 . 3.01.01.01 . 28.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.247.800
JUMLAH		8.231.368.493

3. PERJANJIAN KINERJA

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- 1) Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Ketersediaan pangan asal ikan	Jumlah ketersediaan ikan (ton)	8.312,40
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan(ton)	4.064,68
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase kenaikan Produksi Ikan Budidaya (TON)	408,14
4	Terlaksananya fasilitasi Sarana produksi dan sarana prasarana budidaya Perikanan	Tersedianya data produksi budidaya untuk pembenihan (bulan)	6
		Adanya kaji terap pembenihan ikan haruan	1
		Penggunaan Induk ikan nila bersertifikat untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	3
		Pembinaan ke Pelaku Usaha UPR (kelompok/perorangan)	4
		Tersedianya data produksi budidaya untuk pembesaran	3



		Tersedianya sarana dan prasarana untuk budidaya pakai kolam terpal	3
		Tersedianya data ijin usaha budidaya skala kecil	3
		Adanya kaji terap pembesaran ikan haruan	1
		Adanya kaji terap pembesaran ikan papuyu	1
		Pembuatan leaflet budidaya ikan	1
		Pelaku usaha yang mendapat pelatihan	10
		Pembinaan ke Pelaku usaha budidaya pembesaran baik kelompok atau perorangan	12
		Monitoring hama dan penyakit pada lingkungan budidaya	2
		Melaksanakan pengukuran kualitas air di lokasi budidaya	48
		Melakukan pemeriksaan sampel ke laboratorium	10
8	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap	3.665,54
9	Meningkatnya pengelolaan sumber daya perikanan tangkap	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap (paket)	1
		Terlaksananya pengembangan kapasitas nelayan kecil	12
		Tersedianya daya dan informasi sumber daya ikan	12



10	Tersedianya data kelompok perikanan tangkap	Data kelompok usaha bersama (KUB) yang up date	94
		Data nelayan beserta kapal dan alat tangkap yang digunakan	1.242
11	Tersedianya data produksi perikanan tangkap	Jumlah data produksi perairan rawa	12
		Jumlah data produksi perairan sungai	12
		Jumlah data produksi perairan rawa dan sungai	1
12	Terlaksananya sosialisasi UU Perikanan	Pembuatan spanduk himbauan illegal fishing	8
		Pembuatan leaflet himbauan illegal fishing	50
13	Terlaksananya pengawasan perairan umum	Razia terpadu/patroli bersama	14
14	Terlaksananya fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan	Jumlah sarana yang dipelihara	2
		Pengadaan perahu motor	1
		Pengadaan garasi speed boat	1
15	Terlaksananya pembinaan kelompok pengolah hasil perikanan	Jumlah kelompok baru	1
		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (kg)	200.000
16	Terlaksananya pemeriksaan bahan pangan asal ikan	Jumlah sampel yang diperiksa	10
17	Terlaksananya promosi usaha hasil perikanan	Jumlah promosi yang dilaksanakan	4
18	Terlaksananya ketersediaan bahan pangan asal ikan	Jumlah ketersediaan bahan pangan asal ikan (ton)	5.802
		Jumlah ikan masuk (ton)	4.463
19	Terlaksananya diklat usaha perikanan	Menyusun laporan kelompok yang mengikuti diklat usaha perikanan	4



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

1. Capaian Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Tapin

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian			% Capaian (2022)
				2022	2021	2020	
1	Ketersediaan pangan asal ikan	Jumlah pangan asal ikan	8.312,40	13.158,67	13.411,84	5.049,81	158,30%
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan	4.064,68	4.067,47	3.725,06	4.481,30	100,07%

Ada penurunan di sektor perikanan tangkap di mana produksi tahun 2022 adalah sebesar 3.642,26 Ton. Untuk peningkatan produksi perikanan tangkap disarankan untuk diadakan restocking benih ikan di lahan perairan sungai dan rawa agar kuantitas sumber daya ikan kembali bisa memenuhi kebutuhan pangan asal ikan di kabupaten Tapin.

a. Capaian Kinerja Utama Bidang Budidaya Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2022)	Capaian (2022)	% Capaian	Keterangan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase kenaikan Produksi Ikan Budidaya	408,14	425,21	104,18 %	Kabid Perikanan Budidaya/ Es. III

Indikator kinerja Kabid Perikanan Budidaya adalah Produksi ikan dari hasil budidaya tahun 2022 sebesar 425,41 Ton dan dibandingkan target tahun 2022 adalah sebesar 408,14 Ton sehingga pencapaian persentase kenaikan produksi ikan budidaya tahun 2021 adalah sebesar 85,59 %. Untuk rincian hasil produksi ikan dari hasil budidaya adalah sebagai berikut :



No.	Kecamatan	TOTAL PRODUKSI
		Produksi (Kg)
1	Binuang	1.327,00
2	Hatungun	4.569,00
3	Tapin Selatan	23.207,00
4	Salam Babaris	770,00
5	Tapin Tengah	7.374,00
6	Bungur	153.256,00
7	Piani	1.944,00
8	Lokpaikat	180,00
9	Tapin Utara	6.922,00
10	Bakarangan	50.942,00
11	Candi Laras Selatan	112.485,00
12	Candi Laras Utara	62.234,00
Total		425.210

Hasil Capaian tahun 2022 terjadi kenaikan terhadap capaian tahun 2021 yang sebesar 153,51 %.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	
		2022	2021
1 Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Persentase kenaikan Produksi Ikan Budidaya	104,18%	95,83%

b. Capaian Kinerja Utama Bidang Perikanan Tangkap dan SDI

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2022)	Capaian (2022)	% Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan tangkap	3.665,54	3.642,26	99,61 %	Kabid Perikanan Tangkap dan SDI / Es. III



Sasaran strategis untuk bidang perikanan tangkap dan SDI yaitu persentase penurunan produksi ikan tangkap dengan realisasi 99,61 %. Dalam hal ini jumlah produksi ikan hasil tangkapan pada tahun 2022 adalah sebesar 3.642,26 Ton dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Ikan/ Kind of Fish	Satuan	Jumlah/ Total
01. Betok	ton	329,18
02. Sepat Rawa	ton	434,59
03. Gabus/Haruan	ton	373,79
04. Toman	ton	154,97
05. Sepat Siam	ton	418,90
06. Tambakan	ton	134,23
07. Lele	ton	105,41
08. Ikan Lain-lain (rawa)	ton	74,61
09. Jelawat	ton	339,13
10. Baung	ton	376,80
11. Nila	ton	216,63
13. Jambal/Patin	ton	155,44
14. Nilem	ton	22,71
15. Parai/Seluang	ton	59,75
16. Tawes	ton	0,00
17. Gurame	ton	139,28
18. Lais	ton	164,81
19. Mas	ton	27,97
20. Belida	ton	4,19
21. Ikan Lain-lain	ton	25,03
22. Salab/Lampan	ton	32,87
23. Udang Galah	ton	42,74
24. Udang Lainnya	ton	9,22
Jumlah	ton	3.642,26

3. Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2022)	Capaian (2022)	% Capaian	Keterangan
Meningkatkan klasifikasi kelompok Usaha Perikanan	Persentase kelompok Usaha Perikanan yang meningkat klasifikasinya (%)	1	2	200%	Kabid Pemberdayaa n Usaha Perikanan / Es. III



Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan bertanggung jawab atas sasaran strategis meningkatkan klasifikasi kelompok usaha perikanan dengan indikator kinerja persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat klasifikasinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Keberhasilan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan dukungan anggaran dari tingkat Pusat sampai Daerah.
2. Selain alokasi dana APBD Kabupaten , maka dukungan dana dan pembinaan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait amat besar pengaruhnya dalam menentukan pencapaian keberhasilan sasaran strategis SKPD.

Permasalahan Yang Dihadapi

- a. Penangkapan Ikan di Perairan Umum
 - ✓ Fungsi dan peran POKWASMAS masih belum optimal dalam rangka menekan angka Illegal Fishing
 - ✓ Aspek pengawasan dan perlindungan sumber daya perikanan perairan umum dengan segala keterbatasan yang ada memerlukan penanganan dan perhatian yang lebih khusus dari semua pihak.
 - ✓ Minimnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengawasan khususnya transportasi air seperti kelotok, speed boat, serta alat komunikasi standar dan menara pengawasan.
 - ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya perikanan yang mengakibatkan kelangkaan jenis - jenis ikan yang menjadi mata pencaharian masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat yang tinggal di lingkungan perairan itu sendiri.
 - ✓ Masih maraknya alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan / dilarang UU Perikanan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab
- b. Budidaya air Tawar
 - ✓ Sarana pembenihan (UPR dan BBI) belum berfungsi optimal.
 - ✓ Daya dukung sarana dan prasarana masih kurang.
 - ✓ Belum optimalnya pemanfaatan potensi rawa .



- ✓ Masih rendahnya Luas Areal budidaya jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki dan terbatas serta belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- ✓ Kontinuitas ketersediaan air yang tidak tersedia sepanjang tahun, bencana banjir, dan pencemaran air sehingga terjadinya kematian ikan yang menyebabkan keengganan petani budidaya untuk melakukan budidaya.
- ✓ Belum seimbang antara kebutuhan Sarana produksi dan luasan potensi sumber daya perikanan karena keterbatasan anggaran dan modal yang dimiliki petani ikan.
- ✓ Ketersediaan air sebagai sumber air bagi budidaya kolam.

Upaya Mengatasinya

a. Penangkapan Ikan di Perairan Umum

- ✓ Melakukan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan seperti pelaksanaan kegiatan pengembangan reservat serta kegiatan restocking yang berfungsi untuk mengembalikan keberadaan jenis-jenis ikan tertentu dalam suatu perairan.
- ✓ Meningkatkan pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat tentang arti penting pelestarian SDI.
- ✓ Melakukan koordinasi dan pengawasan secara intensif bersama-sama instansi terkait.
- ✓ Memberikan solusi kegiatan usaha alternatif selain usaha penangkapan sehingga petani tetap dapat mencukupi kebutuhan dan meningkatkan pendapatannya.
- ✓ Menggalang, menggunakan sekaligus membina SIWASMAS dengan membentuk POKWASMAS dengan mengupayakan sarana dan prasarana pendukung guna mendukung optimalnya fungsi dan peran POKWASMAS.
- ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan seperti kelotok, speed boat, garasi speed boat dan alat komunikasi standar.
- ✓ Melaksanakan Sosialisasi UU Perikanan dan lebih menekankan pada pentingnya pelestarian Sumberdaya Perikanan.
- ✓ Meningkatkan razia Gabungan dan menindak tegas oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab



b. Pengembangan Budidaya Air Tawar :

- ✓ Optimalisasi UPR dan BBI Binuang serta BBI Lokal Linuh.
- ✓ Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya.
- ✓ Optimalisasi rawa melalui usaha budidaya ikan lokal ekonomis beserta peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang.
- ✓ Penambahan sarana dan prasarana dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan hasil produksi perikanan.
- ✓ Koordinasi antar instansi Pemerintah dan Perusahaan dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan.
- ✓ Adanya penyediaan paket - paket percontohan budidaya serta permodalan dalam peningkatan produksi.

B. Realisasi Pencapaian Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan tahun 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	%
3.01 . 3.01.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197.600.000	171.540.000	86,81
3.01 . 3.01.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	197.600.000	171.540.000	86,81
3.01 . 3.01.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.060.427.891	3.846.523.857	94,73
3.01 . 3.01.01.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.000.858.291	3.787.087.257	94,66
3.01 . 3.01.01.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.600.000	22.582.300	99,92
3.01 . 3.01.01.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.969.600	36.906.600	99,83
3.01 . 3.01.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	943.749.600	867.728.403	91,94
3.01 . 3.01.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.889.000	31.889.000	100
3.01 . 3.01.01.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.275.000	47.201.000	90,29



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

3.01 . 3.01.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.354.600	139.544.600	89,82
3.01 . 3.01.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.300.000	5.574.800	88,49
3.01 . 3.01.01.01 . 06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.387.000	10.985.000	96,47
3.01 . 3.01.01.01 . 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000	2.400.000	100
3.01 . 3.01.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	684.144.000	630.134.003	92,11
3.01 . 3.01.01.01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	318.086.700	226.734.000	71,28
3.01 . 3.01.01.01 . 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.086.700	226.734.000	71,28
3.01 . 3.01.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.528.400	195.051.643	77,86
3.01 . 3.01.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.188.400	125.551.643	72,92
3.01 . 3.01.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.430.000	69.500.000	88,72
3.01 . 3.01.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.355.800	433.179.081	91,71
3.01 . 3.01.01.01 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.500.400	189.632.681	88,82
3.01 . 3.01.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.775.400	16.520.000	64,09
3.01 . 3.01.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	223.080.000	227.026.400	97,40
3.01 . 3.01.01.01 . 15	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	96.810.700	95.443.700	98,59



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

3.01 . 3.01.01.01 . 15.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	35.050.700	34.540.700	98,54
3.01 . 3.01.01.01 . 15.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	61.760.000	60.903.000	98,61
3.01 . 3.01.01.01 . 16	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.580.000	52.225.000	97,53
3.01 . 3.01.01.01 . 16.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	53.580.000	52.225.000	97,53
3.01 . 3.01.01.01 . 22	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.500.000	15.500.000	100
3.01 . 3.01.01.01 . 22.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.500.000	15.500.000	100
3.01 . 3.01.01.01 . 24	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.447.600.302	1.417.952.664	97,52
3.01 . 3.01.01.01 . 24.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.087.806.952	1.070.159.064	98,38
3.01 . 3.01.01.01 . 24.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	327.593.350	321.733.600	98,21
3.01 . 3.01.01.01 . 24.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.700.000	10.560.000	62,23
3.01 . 3.01.01.01 . 25	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	195.967.800	193.917.300	98,95
3.01 . 3.01.01.01 . 25.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	195.967.800	193.917.300	98,95
3.01 . 3.01.01.01 . 26	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	36.400.000	36.000.000	98,90
3.01 . 3.01.01.01 . 26.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.400.000	36.000.000	98,90



3.01 . 3.01.01.01 . 27	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	4.760.000	2.796.000	58,74
3.01 . 3.01.01.01 . 27.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	4.760.000	2.796.000	58,74
3.01 . 3.01.01.01 . 28	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	153.501.300	126.221.500	82,23
3.01 . 3.01.01.01 . 28.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	132.253.500	109.408.700	82,73
3.01 . 3.01.01.01 . 28.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.247.800	16.812.800	79,13
JUMLAH		8.231.368.493	7.665.343.148	93,12

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan jawaban atas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah menjadi fokus Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja pada masing-masing bidang di Bappelitbang, dibantu juga dengan adanya aplikasi berbasis web seperti e-office guna menunjang peningkatan kinerja. Adapun kendala kekurangan personel pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dapat diatasi dengan rekrutmen tenaga kontrak yang mampu membantu tugas-tugas dan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang.



2. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Bappelitbang dirasa sudah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Hal ini berbanding lurus dengan tersedianya anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana tersebut.

3. Anggaran

Indikator ini didukung dengan pagu anggaran yang ada pada DPA Dinas Perikanan Tahun 2022 sebesar **Rp 8.231.368.493,00** dan terserap sebesar Rp **7.665.343.148,00 (93,12%)**.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Tapin. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin pada Tahun 2022 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang bersifat administrasi dan program pembangunan perikanan yang berasal dari sumber dana APBD Kabupaten. Pada tahun 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Tapin menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Perubahan IKU Rencana Strategis 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)



Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa :

“Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian Kinerja Dinas Perikanan dengan persentase capaian kinerja > 100% atau Baik Sekali (BS) yaitu 158,30 % dan 100,07%.”

Berbagai hambatan sering kali ditemukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin selama tahun 2022, namun secara umum program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Dinas Perikanan Kab.Tapin akan terus mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis dinas, maka mutlak hasil evaluasi kinerja tahun ini baik yang tercapai maupun yang belum tercapai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menjadi bahan pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun ke depan sehingga target-target kinerja bisa tercapai. Dengan komitmen dan tekad yang kuat, kerja sama yang solid di semua jajaran dinas/instansi terkait dan peningkatan kualitas etos kerja, mengoptimalkan potensi daerah dan sumber daya yang ada serta terus memperbaiki fungsi manajemen dan tahap perencanaan, maka optimisme untuk terus melakukan peningkatan kinerja akan dapat diwujudkan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Perikanan Kabupaten Tapin dan hasil-hasilnya.